

15

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 6

TAHUN 2006

Lapindo Harus Bayar Relokasi Infrastruktur

Jakarta-Pemerintah berupaya menagih sekitar Rp 2 triliun kepada PT Lapindo Brantas untuk merelokasi jalan tol dan jalan arteri yang tertutup lumpur dari sumur Banjar Panji-1 di Sidoarjo. Relokasi infrastruktur oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono diperintahkan harus selesai akhir tahun 2007.

Pada 3 Januari 2007 nanti, beberapa departemen yang terkait dengan kejadian itu akan membahas detail rencana relokasi tersebut dengan Presiden. "Hasil pembahasan tersebut digunakan untuk berunding dengan Lapindo berapa kebutuhan dana untuk relokasi infrastruktur," ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto usai pemaparan kinerja Departemen PU, Jumat (29/12).

Menteri PU mengatakan

sesuai dengan Keppres No 13 Tahun 2006, Presiden memutuskan biaya penanggulangan akibat semburan sumur tersebut sepenuhnya dibebankan kepada Lapindo.

"Kalau dapat dibuktikan ini kesalahan Lapindo, seluruh biaya relokasi menjadi beban mereka," tegas Menteri.

Menteri menjelaskan untuk relokasi jalan tol dan jalan arteri dibutuhkan Rp 1,6 triliun yang masing-masing sekitar 11 kilometer. Sementara itu, untuk relokasi rel kereta api, Djoko memperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 350 miliar.

Menteri melanjutkan relokasi harus dilakukan karena para ahli yang diundang tim nasional penanggulangan bencana menyatakan dalam radius 1-2 kilometer dari pusat semburan lumpur

tidak layak digunakan untuk permukiman maupun kegiatan ekonomi lain.

Pada radius itu, lanjut Djoko, para ahli menyatakan kawasan tersebut berbahaya untuk dihuni manusia dan untuk infrastruktur umum serupa jalan dan rel kereta api.

Dia menambahkan bahkan untuk infrastruktur seperti pipa gas maupun jaringan transmisi listrik yang ada di sekitar kawasan itu, dinilai para ahli juga berbahaya. Pasalnya kondisi tanah dalam radius tersebut sangat labil untuk segala infrastruktur.

Djoko mengatakan pemerintah memang berupaya meminta pertanggungjawaban Lapindo untuk menanggung seluruh biaya relokasi infrastruktur. Namun, Lapindo masih

diberi kesempatan berargumentasi dengan pemerintah.

Djoko menjelaskan Keppres tersebut berakhir sampai Maret 2007, sehingga pemerintah berupaya mempercepat relokasi. "Begitu pula untuk mempercepat negosiasi dengan Lapindo," tutur Djoko.

Pihak Lapindo, kata Djoko, juga dibebankan untuk kompensasi kepada masyarakat sekitar. Kompensasi tersebut berupa membeli lahan, sawah, rumah, membayai sewa rumah, dan uang makan.

Untuk sawah, Lapindo harus mengganti Rp 125.000 per meter persegi, lalu pekarangan diganti Rp 1 juta, dan rumah Rp 1,5 juta. "Semua harus dibayar minimal 25 persen pada Maret 2007," tegasnya.

(layana susapto)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 **30** 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2006

Lapindo finds mudflow disaster costs, compensation too much

Indra Harsaputra

The Jakarta Post/Sidoarjo

The company at the center of the Sidoarjo mudflow disaster in East Java has said it is committed to remunerating victims as instructed by President Susilo Bambang Yudhoyono but the compensation figure is too high.

The vice president of PT Energi Mega Persada, Yusuf M. Martak, issued the statement to *The Jakarta Post* on the sidelines of a press conference in Sidoarjo on Friday.

Lapindo Brantas Inc., which owns a 50 percent operating stake in the Brantas gas block, is 99.9 percent owned by PT Energi Meda Persada through Kalila Energy Ltd. and Pan Asia Enterprises Ltd.

The other half of the Brantas gas block is owned by PT

Medco Energi International and Santos, with 32 percent and 18 percent of the shares respectively.

"The Lapindo case is still with police. Lapindo has not been declared guilty in the drilling process that lead to the leakage of the mud. Keep in mind that we have long committed morally to dealing with the hot mudflow, but, due to the complexity of the problem, we are fighting a losing battle," he said.

He was responding to Yudhoyono's instruction Thursday that Lapindo begin compensating affected residents in March.

The President said the compensation would cost the company around Rp 2.5 trillion (US\$276.8 million). In addition to compensation, Lapindo Brantas also will have to spend some Rp 1.3

trillion to stop the mud, which has been gushing from its gas exploration site since May 29.

Yusuf said the company would purchase all affected land, buildings and rice fields, as previously agreed.

"But honestly, with the figures given by the President, Lapindo's total current assets won't be enough to cover the costs incurred as a consequence of the disaster," Yusuf said.

He said the two other companies that owned the Brantas block, Medco and Santos, would not share the operational and compensation expenses.

"Most of the costs will be covered by Energi Mega Persada. Lapindo will try to find other sources to cover part of the costs."

Basuki Hadimulyono, the head of the team appointed by the government to handle the

disaster, said it would continue working to contain the disaster until its term ended in March, promising to complete any unfinished tasks, including recounting the number of houses affected by the mudflow and calculating the financial losses suffered by the inundated companies and affected workers.

"We are also planning to build a permanent canal to divert the mud into the sea and will continue to drill relief wells to try and stop the sludge."

With rain starting to set in, he said the team would continue directing the mud into Porong River while working to repair damaged ponds.

Heavy rain has caused the mudflow to break its barriers, inundating at least 170 more houses in Renokenongo subdistrict.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31									
HALAMAN : A6											TAHUN 2006

Lapindo Akan Jual Lagi Tanah Korban Lumpur

SIDOARJO — Lapindo Brantas Inc. berkukuh hanya akan membayar ganti rugi tanah dan rumah milik korban lumpur yang besertifikat. "Karena tanah itu nantinya akan dibeli pihak lain," kata Vice President PT Energi Mega Persada Yusuf Martak di Sidoarjo kemarin. Sertifikat tanah merupakan syarat mutlak.

Yusuf menegaskan Lapindo tak ingin tanah yang dibeli tidak laku dijual ke pihak lain. Lapindo, kata dia, juga hanya mengganti rugi lahan dan bangunan di empat desa, yaitu Siring, Renokenongo, Jatirejo, dan Kedungbendo, sebagaimana hasil kesepakatan dengan warga pada 4 Desember lalu di pendapa Kabupaten Sidoarjo. "Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (yang kini terendam lumpur) tidak mendapat ganti rugi," katanya.

Bupati Sidoarjo Win Hendrar-

so mengingatkan hasil pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu secara eksplisit tidak mensyaratkan jual-beli tanah korban lumpur mengharuskan adanya sertifikat.

"Prinsipnya, meski petok D asal tanah tersebut tidak bermasalah dengan saksi kepala desa dan camat, Lapindo sudah bisa membayarnya," kata Win menanggapi penjelasan Yusuf.

Dia berjanji segera membentuk tim verifikasi tanah dan bangunan untuk memperlancar proses ganti rugi tersebut. "Jika perlu tim ini membantu proses pembuatan sertifikat tanah warga," ujarnya.

Proses ganti rugi dijadwalkan awal Maret 2007 dengan terlebih dulu membayar uang muka sebesar 20 persen. Adapun proses verifikasi dimulai pada 10 Januari di sebuah kantor di Jalan Sultan

Agung 19 A Sidoarjo, Jawa Timur.

Kesepakatan ganti rugi, yakni lahan sawah Rp 120 ribu per meter persegi, pekarangan Rp 1 juta per meter persegi, dan bangunan Rp 1,5 juta per meter persegi.

Di tempat terpisah, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan Jalan Raya Porong, yang menjadi satu-satunya akses jalan Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi, akan direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Pemindahan itu didasarkan pada hasil kajian ahli geologi. "Pada radius 1,5 kilometer tidak boleh ada apa-apa," kata Djoko di kantornya kemarin. Menurut dia, jalan itu harus dipindah karena berada di daerah berbahaya. Selain itu, katanya, pemerintah sudah memutuskan merelokasi rel listrik, jalan tol, transmisi listrik, dan pipa gas.

● ROHMAN TAUFIQ | RIEKE RAHADIANA

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2006

**CITIC seals \$1.9b
Kazakh oil deal**

BEIJING: Chinese conglomerate CITIC announced Sunday that it had acquired the Kazakhstan oil assets of Canada's Nations Energy Co for US\$1.91 billion, state news agency *Xinhua* reported.

State-owned China International Trust and Investment Corp and Nations Energy first said in October that they were working on the deal, which still requires the approval of Kazakh authorities.

The agreement — one of the biggest overseas oil acquisitions made by a Chinese company — allows CITIC to develop the Karazhanbas oil field in western Kazakhstan. — AFP

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										

HALAMAN : 19

TAHUN 2006

Presiden: Lapindo Harus Keluarkan Rp 3,8 Triliun

[JAKARTA] Rapat kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak Rabu (27/12) dan berlanjut Kamis (28/12) memutuskan, PT Lapindo Brantas harus mengeluarkan dana Rp 3,8 triliun. Dana itu untuk penuntasan penanggulangan semburan lumpur Rp 1,3 triliun dan pembelian lahan serta santunan kepada masyarakat yang menjadi korban Rp 2,5 triliun. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers, sesuai rapat kabinet, khusus membahas semburan lumpur di Sidoarjo, Kamis (28/12), di Kantor Presiden.

Tentang dana yang harus ditanggung PT Lapindo yang sebesar Rp 1,3 triliun, menurut Presiden, selama tiga bulan, sampai Maret 2007 sudah harus bisa dituntaskan. Ini kepastian pertama, mudah-mudahan bisa segera menuntaskan semua pekerjaan. Kepastian kedua, dana kompensasi atau ganti rugi, pada Maret 2007 sudah

harus dibayarkan Lapindo.

"Dibayarkan dua puluh persen sebagai uang muka dan berlanjut melalui proses administrasi dan verifikasi teknis di lapangan yang kita harapkan berjalan tertib dan akurat," katanya.

Presiden Yudhoyono juga mengakui, pada kenyataannya luapan lumpur tersebut sampai hari ini belum dapat dihentikan. "Ini fakta yang saya sampaikan secara terbuka, dan dengan demikian daerah luapan lumpur menjadi daerah berbahaya dan tidak dapat dihuni atau menjadi tempat berusaha," katanya.

Karena itu, infrastruktur fisik seperti jalan tol, rel kereta api, transmisi listrik, pipa gas dan jalan arteri nasional tidak dapat digunakan. Pemerintah berencana memindahkan semua itu dengan membuat infrastruktur baru dalam jangka waktu satu tahun.

Ketika ditanya siapa yang akan membiayai pembangunan infrastruktur tersebut, menurut Presiden, jika memang terkait dengan

semburan lumpur, Lapindo yang harus memikulnya. Jika bukan, akan menjadi bagian dari pemerintah. "Karena itulah tidak bisa saya jelaskan sekarang mana-mana yang menjadi bagian dari Lapindo dan mana-mana yang bukan, menteri teknis dan Gubernur Jatim, Bupati Sidoarjo dan Lapindo akan bekerja sama untuk menentukan itu," katanya.

Pemerintah juga memutuskan, pabrik pupuk PT Petrokimia Gresik harus tetap beroperasi dengan memperoleh pasokan gas. Di samping itu, pemerintah juga menyatakan membantu keberlanjutan ekonomi regional dengan antara lain memberlakukan skim khusus di bidang fiskal dan perbankan.

Menjawab pertanyaan tentang penggunaan pelabuhan alternatif, misalnya di Probolinggo atau Banyuwangi, Presiden menyebutkan, langkah-langkah itu akan ditentukan Gubernur Jatim, dan pemerintah pusat akan memberikan dukungan.

Langkah tersebut juga harus seiring dengan pengembangan Jatim dalam perekonomian yang selama ini terganggu.

Menurut Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, selama terjadinya semburan lumpur di Sidoarjo, arus barang dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Perak memang mengalami keterlambatan. Akibatnya, ada kenaikan biaya yang mencapai 30 persen, padahal ada 1,8 juta teus (*twenty feet equivalent units*) setiap tahunnya. Alternatif yang dipilih, dengan membuka pantai di timur Sidoarjo agar bisa didarati kapal-kapal LCT dan peti kemas diangkut ke situ untuk kemudian dibawa ke Tanjung Perak.

Disesalkan

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Soetrisno Bachir mengatakan, sangat disesalkan sikap pemerintah yang hanya menunggu inisiatif Lapindo, dalam penanganan bencana lumpur di Sidoarjo. Pe-

merintah didesak segera mengambil inisiatif yang lebih tegas, dan jelas dalam penanganan dampak lumpur ini.

PAN berpendapat Lapindo adalah pihak yang tetap harus bertanggung jawab atas bencana tersebut. Di sisi lain, PAN menilai tindakan pemerintah yang terkesan menunggu inisiatif Lapindo adalah tindakan yang sangat disesalkan, katanya.

Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi meminta pemerintah melalui tim nasional, segera bertindak mengatasi akibat dari bencana lumpur Lapindo.

Juru bicara Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur, Rudi Novrianto mengatakan, penghentian penyumbatan semburan lumpur panas bercampur gas melalui cara *relief well* di Sidoarjo, molor dari akhir Desember menjadi sampai akhir Februari 2007. Molornya jadwal tersebut karena terkendala meledaknya pipa gas bulan lalu. [Y-3/B-14/029/148/080]